

SUPERVISI DALAM MONITORING TUGAS PENDAMPING DI FAMILY DEVELOPMENT SESSION PROGRAM KELUARGA HARAPAN

THE SUPERVISION IN THE MONITORING OF THE ASSISTANT DUTY AT THE FAMILY DEVELOPMENT SESSION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM

Siti Syahmira Aulia Noor¹, Sudarini²

^{1,2}IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan, 12610, Indonesia

Email: ¹aulianoors@gmail.com, ²sudarini@iisip.ac.id

Abstrak – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dirancang dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan dari program ini salah satunya ditentukan oleh pendamping program yang intensif dan berkelanjutan yang memiliki peran sebagai fasilitator, edukator dan perwakilan masyarakat. Fungsi supervisi dalam monitoring tugas PKH sangat penting untuk diperhatikan. Supervisor mendukung pendamping dalam tugasnya melakukan pemberdayaan dalam PKH terutama dalam kegiatan *Family Development Session* (FDS). Artikel ini menggambarkan pelaksanaan fungsi supervisi PKH berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Cimangis, Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 fungsi supervisi yang dilaksanakan yaitu (1) fungsi administrasi yang berkaitan dengan laporan, manajemen kasus, penanganan dan pengaduan; (2) fungsi edukatif/pendidik yaitu berkaitan dengan transfer ilmu atau nilai oleh supervisor kepada pendamping; (3) fungsi dukungan yaitu pemberian semangat kerja dan dukungan kepada pendamping.

Kata Kunci: *Family Development Session*; Monitoring; Program Keluarga Program Keluarga Harapan; Supervisi

Abstract – The Family Hope Program (PKH) is a program designed with the aim of improving people's lives. One of the success of this program is determined by the intensive and sustainable program assistants who have roles as facilitators, educators and community representatives. The role of a supervisor in monitoring mentors of the PKH is essential to be studied. The supervisor supports and empowers mentors, especially in the Family Development Session (FDS) activity. This article describes the implementation of the PKH supervision function based on the results of research in the Cimanggis sub-district, Depok. The research method used is descriptive qualitative with primary and secondary data collection through observation, interviews and documentation. As a result, this research uncovers three roles of a supervisor in this program. First is an administrative function comprising making reports, case management, and conflict and complaint management. Another part is to educate and manage the value and knowledge transfer to the mentors. Lastly, the supervisor's role in the program is to provide moral support and resources to mentors.

Keywords: *Family Development Session*; Monitoring; Family Hope Program; Supervision

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif profesi pekerjaan sosial, orang miskin adalah orang yang mengalami disfungsi sosial karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan (Suharto, 2013).

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama mengingat jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kota Depok pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen poin atau bertambah 3,43 ribu orang. Pada 2020 persentase

penduduk miskin mencapai 2,45 persen atau sebesar 60,43 ribu orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 2,58 persen atau sebesar 63,86 ribu orang (Hilmiah, 2021). Upaya untuk memperbaiki program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Berbagai kelemahan dalam implementasi program bantuan sosial sebelumnya terus diperbaiki agar benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, yaitu mendorong produktivitas masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dasar melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha serta

perluasan jaringan usaha. Hal yang mendasar dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan program pemberdayaan masyarakat serta mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial.

Bantuan sosial dapat menjadi sarana untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus memperkecil kesenjangan sosial, namun efektivitas dari program tersebut harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan keluarga melalui pemberian bantuan sosial, pengetahuan, dan keterampilan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan keluarga tersebut sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan sumber yang dimiliki. Menurut Suharto (2013) pemberdayaan keluarga merupakan sistem penanganan masalah yang berbasis pada keluarga dan diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material bercirikan kemandirian sehingga tercipta keluarga sejahtera. Dalam proses ini, pendamping mengajak keluarga untuk melihat permasalahan yang dihadapi, juga melihat kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan lebih lanjut juga melihat peluang yang dapat membantu mereka (Mardikanto & Soebianto, 2017).

PKH merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah kepada keluarga miskin agar memiliki akses pada berbagai bidang kehidupan. Selain memberikan bantuan sosial secara ekonomi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga disertai dengan pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Intervensi keluarga merupakan metode yang digunakan dalam PKH, karena keluarga merupakan suatu sistem yang anggotanya saling berinteraksi dan bergantung satu dengan lainnya, sehingga masalah yang dihadapi salah satu anggotanya akan mempengaruhi anggota lain dalam keluarga tersebut (Adi, 2013)

Kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan memberikan pengetahuan praktis mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan pendampingan, maka dibentuk kelompok dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan. Kelompok itu disebut dengan *Family Development Session* (FDS) atau Pertemuan Peningkatan kemampuan Keluarga (P2K2)

Kegiatan melalui pendampingan diyakini dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan anggota FDS. Perlunya pendampingan karena terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga sumber daya yang dimanfaatkan. Untuk itu, pendamping harus dipersiapkan dengan baik, disinilah kemampuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan untuk membantu masyarakat (Sumodiningrat, 2009)

Tugas pendamping dalam pelaksanaan program di lapangan sangat penting karena secara teknis pendamping terlibat langsung dengan masyarakat, mengidentifikasi masalah dan mendorong usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Untuk

itu, pendamping harus memiliki dasar pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam pemberdayaan.

Peran fasilitatif yang dilaksanakan dalam proses pendampingan meliputi animasi sosial, mediasi dan negosiasi, mendukung, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, mengorganisasi, komunikasi personal sangat diperlukan; peran edukasional meliputi kegiatan untuk membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melatih; peran *representasional* diantaranya adalah mencari sumber daya dan memanfaatkan media, mengembangkan jaringan dan peran teknis mampu melakukan presentasi, menggunakan komputer (Ife, 2006).

Sebelum melaksanakan tugasnya, pendamping telah dibekali kemampuan dalam memberikan motivasi, fasilitasi serta advokasi kepada penerima manfaat juga dapat melakukan identifikasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaiannya, namun pada praktiknya masih mengalami kesulitan di lapangan apalagi jika pendamping tersebut belum memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan. Melihat permasalahan tersebut, maka dalam menjalankan tugasnya pendamping PKH didampingi oleh pekerja sosial supervisor.

Peran pekerja sosial supervisor ini untuk melakukan supervisi, agar pendamping melaksanakan tugasnya di lapangan sesuai tujuan program tersebut. Supervisi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk membantu dan melatih staf atau pendamping sehingga mampu bekerja lebih efektif (Kadushin & Harkness, 2022). Fokus utama supervisi diarahkan pada proses pendidikan untuk melengkapi pendamping dengan pengetahuan, keterampilan dan mengontrol akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Supervisi merupakan, kegiatan dalam pekerjaan sosial yang dapat meningkatkan kapabilitas seseorang. Supervisi dibutuhkan karena kegiatan di dalamnya mencakup komponen yang dapat meningkatkan kapabilitas melalui transfer ilmu dari yang sudah berpengalaman (Yana Safitri dkk, 2017) tujuan supervisi adalah meningkatkan efektivitas dengan memberikan keterampilan praktis dan penguasaan pengetahuan. Supervisi melakukan pengamatan secara langsung dan berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pendamping, jika ditemukan masalah segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung untuk mengatasinya. Tujuan dari supervisi menjamin proses pemberian layanan dapat berjalan secara efektif dan berkualitas. Dengan cara membantu petugas lapangan atau pendamping secara langsung sehingga pendamping memiliki bekal yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan hasil yang baik. Dalam pekerjaan sosial, supervisi memiliki tujuan untuk menjamin proses pemberian layanan kepada klien dapat berjalan secara efektif dan berkualitas.

Supervisor PKH pada dasarnya adalah seorang penghubung yang berada pada posisi ditengah yaitu antara pendamping atau petugas lapangan dengan lembaga (Sidik, 2017) Supervisor memiliki tugas membantu

pendamping dalam mengatasi masalah dan kesulitan dalam tugas, meningkatkan kemampuan, dan memberikan dorongan semangat agar pendamping dapat melaksanakan tugasnya, bersama-sama dengan pendamping untuk menyusun rencana kerja, evaluasi serta perubahan rencana jika diketahui ada masalah di lapangan.

Supervisi dalam pekerjaan sosial memiliki 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Administrasi
Kualitas pelayanan kepada penerima pelayanan harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh lembaga. Kegiatan yang dilakukan supervisor dalam kaitan dengan fungsi administrasi berupa pelaksanaan standar pelayanan, manajemen kasus, penanganan aduan. Dalam kaitan dengan PKH, maka supervisor menjamin agar terdapat kejelasan tujuan, tugas dan tanggung jawab pendamping
2. Fungsi Edukatif
Fungsi ini memberikan penguatan terhadap staf atau pendamping penguasaan pengetahuan dan keterampilan juga penguatan terhadap nilai-nilai profesionalitas saat bekerja. Bentuk kegiatan dari supervisi ini adalah pemberian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, terutama apabila terdapat teknologi baru dalam proses pelayanan. Dalam PKH supervisor membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai/etika pendamping dalam melaksanakan tugas.
3. Fungsi Dukungan
Dalam proses pelaksanaan tugasnya, pendamping tidak dapat melepaskan diri dari tekanan psikologis yang dihadapi seperti jenuh, merasa tidak dihargai, kecewa, frustrasi dan lain lain. Apabila hal ini tidak ditangani, maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi semangat kerja sehingga dapat menurunkan kualitas pelayanan. Supervisor memiliki tugas untuk menghilangkan tekanan pada diri pendamping dan memberikan motivasi kepada pendamping. Supervisor PKH menciptakan iklim kerja yang baik sehingga mampu mendukung kinerja pendamping (Kadushin & Harkness, 2002)

Supervisi dapat dilaksanakan melalui pertemuan secara langsung yaitu pengamatan, pertemuan, diskusi, konsultasi sementara yang tidak langsung dapat menggunakan media *online* seperti wa, email, foto, zoom serta mempelajari dokumen, catatan dan laporan. Cara melaksanakan supervisi melalui pendampingan perseorangan, kelompok dan dilakukan secara tim.

Dengan demikian, jika pendamping menguasai pengetahuan dan keterampilan dan didukung oleh supervisor, maka semua program yang direncanakan dalam pemberdayaan kelompok dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan akan terjadi perubahan sikap dan perilaku dari penerima manfaat.

Supervisor dalam tugas melakukan monitoring pendamping PKH menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari program tersebut, untuk itu kinerjanya juga dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagai proses penaksiran, pemberian angka dan penilaian berkaitan dengan produksi informasi terhadap nilai atau manfaat suatu kegiatan. (William N, Dunn, 2000). Penelitian ini akan membahas sejauh mana supervisor PKH dapat melaksanakan tugasnya sehingga dapat memaksimalkan capaian yang diharapkan.

METODE

Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fungsi supervisi dalam monitoring tugas pendamping dalam kegiatan *Family Development Session* PKH Kecamatan Cimanggis Depok. Hasil pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa pendapat, tanggapan informasi dan konsep untuk menjelaskan suatu masalah (Moleong, 2017).

Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Informan yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang terdiri dari informan utama (internal) yaitu supervisor PKH dan koordinator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Depok. Informan eksternal dua orang pendamping PKH Kecamatan Cimanggis dan dua informan ahli

Analisis data dimulai dengan melihat data yang telah dikumpulkan baik berupa catatan observasi maupun hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data dengan menyeleksi, memilih yang penting dan yang akan dipelajari sesuai tujuan, menggolongkan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti. Kemudian data disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan dalam memahami data tersebut. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data dan memaknai fenomena yang terjadi dalam monitoring supervisi kepada pendamping PKH dan memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil analisis data dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan dalam *Family Development Session* (FDS)

PKH merupakan bantuan bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin dengan fokus agar penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sosial, pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah menjadi anggota FDS dan hadir dalam setiap pertemuan kelompok. FDS merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada penerima bantuan.

Kelompok dibentuk oleh pendamping terdiri dari 20-25 orang biasanya kelompok dibentuk per kelurahan tetapi jika jumlah anggotanya sedikit maka akan digabung dengan wilayah lain. Hal ini dilakukan oleh pendamping

untuk memudahkan dalam melakukan pemberdayaan. Pembentukan kelompok memang menjadi kewenangan pendamping. Setelah kelompok terbentuk, kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan dilakukan dengan terencana.

Kehadiran dalam pemberdayaan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima manfaat, jika penerima tidak mengikuti kegiatan ini dua kali maka bantuannya akan ditangguhkan jika tidak hadir lebih dari tiga kali maka bantuannya akan diberhentikan. Tujuan dari diterapkan sanksi ini adalah supaya masyarakat tidak hanya berharap pada bantuan uang yang diberikan tetapi memiliki motivasi untuk merubah kehidupannya dengan mengembangkan potensi dirinya.

Materi pertemuan kelompok sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berisi pengetahuan dan keterampilan praktis baik di berbagai bidang. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku KPM. Pendamping berpedoman kepada modul yang dibuat secara terpusat, dan buku pintar. Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam menyerap informasi, pendamping juga menggunakan brosur, poster, dan film. Jika dibutuhkan pendamping juga dapat menggunakan laptop, *speaker*, TV dan alat tulis.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya untuk membuka usaha KPM dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan membuat hantaran pernikahan, melakukan usaha makanan seperti terasi bawang, keripik tahu, tempe, jamur, abon sapi, dan abon ayam.

Pendamping dalam Program Keluarga Harapan

Kemampuan pendamping sangat menentukan keberhasilan program, tidak terkecuali program kesejahteraan sosial. Mengacu pada Ife (2006), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan peran-peran teknis bagi klien yang didampinginya.

Peran fasilitatif pendamping PKH ditunjukkan dengan memberikan dukungan untuk terus berkembang dan memfasilitasi anggota kelompok untuk membuat usaha dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya anggota kelompok FDS. Anggota yang akan membuka usaha dibantu untuk mengurus surat izin usaha baik ke RT, RW, kecamatan sampai Walikota. Juga melakukan kerja sama dengan dinas terkait untuk bantuan modal usaha dan mendukung produk UMN. Usaha makanan yang dikembangkan oleh anggota kelompok saat ini seperti terasi bawang, keripik tahu, tempe, jamur, abon sapi, dan abon ayam.

Fasilitasi dalam bidang pendidikan dilakukan bekerja sama dengan guru untuk memantau perkembangan pendidikan anak termasuk kehadiran di sekolah dan perkembangan belajarnya. Pendamping bekerja sama dengan puskesmas untuk memantau perkembangan kesehatan anggota keluarga FDS terutama lansia, ibu hamil, dan balita.

Peran edukasional dilakukan dengan memberikan informasi kepada anggota FDS berupa informasi penyaluran bantuan maupun pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota. Kegiatan dilakukan dengan menyampaikan pengetahuan terkait pengasuhan anak, gizi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, perencanaan usaha. Kegiatan ini dilakukan secara terjadwal satu bulan sekali. Pelatihan merupakan peran edukatif yang spesifik karena mengajarkan cara melakukan sesuatu secara khusus. Pelatihan yang telah diberikan yaitu pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit dan keterampilan membuat hantaran pernikahan.

Peran perwakilan dan keterampilan teknis dilakukan dengan melakukan validasi awal, sosialisasi tentang PKH, melakukan koordinasi dengan para *stakeholder*, pemutakhiran data, verifikasi dan validasi juga melakukan advokasi kepada KPM. Terkait hal tersebut dikemukakan oleh informan eksternal AR:

“Ya itu tadi ya pendampingan untuk penyaluran dan penggunaan bantuan, melaksanakan FDS, verifikasi dan validasi, lalu ada pemutakhiran. Di FDS ya itu tadi memastikan bahwa ada perubahan... apa namanya perubahan dari KPM jadi perubahan ke arah yang lebih baik perubahan pola pikir, perubahan pola hidup yang tadinya mungkin terlalu konsumtif sekarang bisa lebih hemat, yang tadinya angka kekerasan terhadap anak lumayan tinggi sekarang bisa untuk bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik itu sih.”

Semenjak pandemi terdapat perubahan dalam jangka waktu penerimaan bantuan yang semula setiap 3 bulan sekali berubah menjadi 1 bulan sekali. Juga mendapatkan bantuan komplementaritas seperti bantuan fasilitas kesehatan seperti KIS, bantuan fasilitas pendidikan seperti KIP, dan mendapatkan bantuan pangan non tunai yang diberikan 1 bulan sekali, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh pendamping untuk dapat membangun kesadaran anggota kelompok dilakukan dengan membangun komunikasi personal agar penerima tetap mau hadir dalam pertemuan dan kedekatan itu juga dijalin melalui kunjungan ke rumah (*home visit*) seperti yang dilakukan informan internal EH :

“Saya turun langsung. Kadang sebelum corona ini sebulan sekali ada pertemuan kadang dirumah KPM, kadang saya sengaja datang ke salah satu rumah KPM untuk melihat produknya ya terus kadang keliling sama pendamping mungkin ada keluhan apa atau apa lihat produksi mereka seperti apa, dijualnya kaya gimana. Saya keliling itu pas FDS untuk melihat produk melihat proses membuatnya juga. Home visit lah intinya.”

Terdapat lima tahapan penting yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat, pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumber

dan pengembangan jaringan (Sumodiningrat, 2009). Keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan oleh penerima manfaat untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki. Penyadaran akan kemampuan serta manajemen diri dapat membantu masyarakat untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri. Kelima tahapan tersebut telah dilakukan dalam proses pemberdayaan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara, pendamping dalam melaksanakan tugasnya mengalami permasalahan terkait karakter keberagaman anggotanya, mengingat Kota Depok yang dianggap sebagai penyangga ibukota sehingga banyak masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Perbedaan karakter ini memerlukan suatu pendekatan komunikasi yang tepat dalam penyampaian materi. Hal ini disampaikan oleh informan eksternal AR:

“...karena daerah ini kebanyakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kota Depok jadi bisa dibilang karakternya berbagai macam, ee...jadi tantangannya disitu ada yang...ada yang orangnya cukup keras, ada yang orangnya halus, ada orangnya yang peduli ada yang engga. Nah itu sebagai tantangan kami pendamping ketika memberikan sosialisasi tentang materi, penyaluran maka ada KPM yang bisa di kasih tau pelan, ada KPM yang harus berkali-kali diingatkan, ada juga KPM yang cukup agak keras orangnya seperti itu. Dan juga disini juga kan rata-rata untuk ibu - ibu mereka pekerja harian jadi ada yang sambil dagang, ada juga yang mengurus apa jadi PRT. “

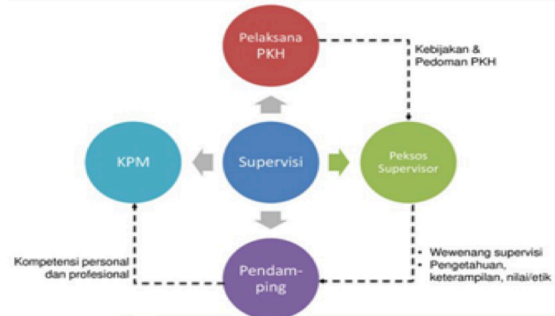
Hambatan lain yang ditemukan adalah kesulitan berkaitan dengan hal hal teknis seperti mengatur jadwal pertemuan FDS karena anggota kelompok bekerja pada siang hari, kesulitan mengumpulkan bapak-bapaknya untuk lebih memperjelas peran ayah dalam keluarga, juga situasi tempat sering tidak kondusif misalnya suasana berisik sehingga susah untuk menjelaskan materi.

Tantangan bagi pendamping PKH adalah merubah pola pikir anggota bahwa bantuan ini hanya bersifat sementara sehingga tidak bisa terus bergantung pada bantuan pemerintah. Pendamping diharapkan dapat mengasah kemampuan para KPM ini agar mereka dapat lepas dari bantuan sosial atau yang disebut dengan graduasi yang artinya mereka dapat keluar dari kategori keluarga prasejahtera.

Supervisi Dalam Program Keluarga Harapan

Supervisi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya (Azwar, 2010). Supervisor

PKH adalah pekerja sosial yang memiliki ilmu atau pengetahuan mengenai supervisi dalam kesejahteraan sosial bertugas melakukan monitoring tugas pendamping dalam melaksanakan pemberdayaan.



Gambar 1 Komponen Supervisi dalam PKH

Sumber : www.pkh.kemsos.go.id

Tujuan supervisi yaitu membantu kelancaran pendamping agar dapat menentukan tujuan, bisa mengkondisikan jadwal agar tidak bentrok dengan tugas lainnya, agar pendamping dapat nyaman bekerja karena memiliki supervisor yang bisa mereka jadikan sebagai teman curhat atau berkonsultasi dalam melaksanakan tugas dan perannya, lalu membantu perencanaan agar lebih rapi sehingga kegiatan FDS terlaksana dengan baik dan rutin. Hal ini disampaikan oleh informan internal EH:

“Ada 4 tugas yang dilakukan supervisor, pertama pendampingan dan monitoring FDS, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga manajemen kasus. Kalo manajemen kasusnya itu fokus ke masalah – masalah sosial anggota. Jadi kalo ada anak yang gamau sekolah atau dibully, ada disabilitas yang belum tercover atau perlu diperhatikan, ada KDRT, ada pelecehan seksual. Pokoknya masalah sosial deh yang terjadi di keluarga KPM. Terus yang terakhir promosi media jadi bisa bikin artikel atau berita atau membantu melibatkan KPM PKH dalam kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Depok.”

Supervisi bertanggung jawab untuk memperbaiki segala sesuatu hal yang dirasa kurang dari suatu program. Suatu program walaupun sudah dikatakan baik pasti perlu adanya pengembangan agar semakin baik lagi. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Supervisor dalam FDS sebagai berikut:

1. Meminta para pendamping untuk mengisi jadwal setiap awal bulan yaitu waktu dan tempat pelaksanaan FDS yang akan dilakukan satu bulan ke depan. Dan berdiskusi tentang rencana pelaksanaan FDS.
2. Melaksanakan pemantauan dengan memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pendamping dalam melaksanakan FDS. Jika terdapat materi yang belum disampaikan, supervisor akan menambahkan materi tersebut. Jika pendamping dinilai kurang dapat

menyampaikan materi misalnya suaranya kurang jelas, terlalu cepat, pesertanya bosan dan ribut sendiri maka supervisor akan membahas dengan pendamping dalam pertemuan khusus untuk memperbaiki pada pertemuan FDS selanjutnya.

3. Membahas catatan dan laporan pendamping. Hal ini dilakukan sebulan sekali melihat hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
4. Membuat laporan bulanan yang harus disampaikan baik kepada UPPKH Kota, Dinas Sosial, maupun pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang supervisor.
5. Membahas isu-isu/kesulitan dalam pelaksanaan FDS, untuk menangani kasus atau kendala dalam pelaksanaan FDS, supervisor akan mendiskusikan dengan pendamping hal-hal apa saja yang dirasa kurang.
6. Mengurangi beban psikologis dalam pelaksanaan FDS dan relasi dengan KPM dan pelaksana PKH lainnya. Dalam hal ini seorang supervisor berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang baik dan membantu pendamping agar tidak selalu merasa bekerja sendiri.

Ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh seorang supervisor. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi administrasi,

Organisasi layanan sosial merupakan sistem yang memiliki fungsi tertentu. Setiap fungsi memiliki tugas dan peran tertentu. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya akan mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut. Fungsi administrasi dapat dilihat dua hal, pertama kesesuaian implementasi kebijakan dan kedua memastikan kepatuhan staf terhadap prosedur tersebut.

Program layanan juga membutuhkan serangkaian prosedur sebagai standar kerja. Pelaksanaan dalam PKH dilakukan dengan laporan rutin kegiatan FDS meliputi daftar hadir, jadwal pelaksanaannya mulai dari hari, tanggal, lokasi FDS, berapa kelompok, materi, notulen beserta dokumentasi. Administrasi harus dilakukan dengan tertib sesuai dengan format yang ada. Laporan yang diminta dapat melalui WA dan *hardcopy*. Dari laporan tersebut, supervisor mempelajari masalah yang terjadi dan mencari upaya penyelesaiannya misalnya mengunjungi anggota yang tidak hadir dalam pertemuan, untuk melihat masalahnya dan menyampaikan bahwa kehadiran dalam pertemuan FDS adalah kewajiban dan ada sanksi yang ditetapkan jika tetap tidak hadir dalam pertemuan.

2. Fungsi Edukasi

Lembaga pelayanan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping PKH, mengembangkan metode

intervensi yang semakin baik sesuai dengan kondisi yang terjadi. Supervisor selalu berusaha untuk mendukung pendamping dan juga tetap membantu pendamping dalam persiapan menyampaikan materi seperti melakukan pemantapan materi walaupun sebelumnya pendamping sudah melakukan diklat. Seperti yang disampaikan informan internal EH :

“Nah untuk fungsi Pendidikan itu yang tadi coaching, coaching itu kita lakukan, ada juga yang tiba – tiba datang sendiri nanya bu kalo materi ini masuknya arahnya kemana? ya saya jelasin seperti ini, kalo contoh seperti ini seperti apa bu, oh ini contohnya seperti ini, kalo contoh yang tidak menjudge anak seperti ini contohnya kalo misalnya anak nomor satu juara anak nomor dua engga coba liat ibu anak nomor dua pinter ngaji ga, pinter ngelukis ga, oh iya anak saya yang nomor dua pinter ngelukis tapi yang satu engga, eee berarti itu kan perbedaan itu lah bu, berarti anak ibu yang kedua itu berarti kelebihannya di seni lukis, kalo yang pertama dipelajaran, berarti anak ibu tuh dua-duanya punya kelebihan, jadi jangan sampe ada kata pinteran anakku yang pertama dibandingkan yang kedua itu harus disampaikan harus yang sperti itu. kalau yang coaching itu kan bareng – bareng semua pendamping”

Dalam evaluasi ini, biasanya supervisor membahas mengenai kendala apa yang dialami para pendamping, kekurangan yang terjadi pada FDS, penyebab terjadinya kendala, dan dicarikan solusinya agar pertemuan selanjutnya tidak terjadi lagi. Tolok ukur untuk melakukan supervisi dalam kegiatan FDS yaitu bagaimana materi tersampaikan dengan baik, supervisor memperhatikan bagaimana cara pendamping menyampaikan materi seperti kepercayaan diri, *public speaking* selain itu perihal tempat pertemuan juga sangat diperhatikan oleh seorang supervisor.

3. Fungsi Dukungan

Supervisor dalam kaitan dengan fungsi dukungan melakukan tugasnya dengan pertama, mengamati terkait dengan penyelesaian tugas apakah seseorang dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan fasilitas, pelayanan dan informasi; kedua terkait dengan kondisi psikologis yang dirasakan pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Dukungan supervisor kepada pendamping disampaikan berikut Informan Internal EH :

“Nah kalo fungsi pendukung ya kita memfasilitasi misalnya modul yang dari provinsi tuh satu tas isinya brosur, flashdisk, CD itu ada disitu. Nah itu saya anjurkan dipakai secara maksimal, dipake semua, sekarang kan semakin kecil bentuknya, semakin enteng kalo dulu gede – gede banget yang mba dulu tuh

gede banget itu mungkin agak menyusahkan dan ga mungkin merata semua dapet, sama yaitu kalo ada kesulitan penyampaian contoh, menjawab pertanyaan, mengatasi KPM yang jenuh, icebreaking itu kan perlu belajar ga semua pendamping bisa ice breaking oh KPM ini udah banyak yang lansia, berarti jangan banyak nulis mending liat poster atau gambar yang penting tersampaikan. Jadi, apa harus dicampur lansia dengan yang muda. Ya seperti itulah kita sampaikan hal – hal yang bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan FDS.”

Supervisor membantu memberi masukan untuk memperkuat tindakan pendamping dalam penanganan kasus. Bentuk dukungan yang dilakukan supervisor kepada pendamping PKH : memfasilitasi materi dan peralatannya, memberikan masukan agar kegiatan menjadi menarik dengan *icebreaking*, membantu memecahkan masalah, memberikan saran dan kritik yang membangun, juga memberikan evaluasi baik kepada individu maupun kelompok. Dukungan juga dilakukan dalam respon kasus pada keluarga yang mengalami masalah misalnya anak-anak mengalami kekerasan, atau di dalam keluarga tersebut ada lansia yang belum mendapat bantuan, juga dukungan kepada keluarga yang akan membuka usaha dengan membantu mengurus perizinan.

Membangun komunikasi personal yang akrab menjadikan suasana menjadi cair sehingga para pendamping tidak sungkan untuk bercerita mengenai hal-hal yang dianggap menjadi kesulitan atau beban. Hal ini tentu akan memudahkan supervisor dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan monitoring tugas pendamping.

Kedudukan supervisi menjadi semakin dibutuhkan oleh pendamping ketika masyarakat mengalami pandemi global akibat virus *corona* yang memiliki dampak kepada masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan serta budaya. Dengan pandemic, maka kegiatan pemberdayaan harus mengikuti panduan adaptasi kebiasaan baru, tidak bisa dilakukan secara tatap muka dengan kelompok yang banyak karena harus menjaga jarak. Hal mendorong pendamping juga harus menggunakan metode, strategi baru dalam melakukan tugasnya selama pandemi, terutama dengan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk komunikasi dan koordinasi, sehingga supervisi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga mendorong motivasi pendamping.

Program PKH yang merupakan implementasi program pelayanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat melalui bantuan sosial dan pemberdayaan. Pemberdayaan menjadi proses yang penting untuk mengukur keberhasilan dari program PKH. Supervisor dalam tugas melakukan monitoring pendamping PKH menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut, untuk itu kinerjanya juga dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagai proses

penaksiran, pemberian angka dan penilaian berkaitan dengan produksi informasi terhadap nilai atau manfaat suatu kegiatan. (William N, Dunn, 2000)

Efektif sebagai suatu keberhasilan yang dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar tujuan tercapai maka akan semakin efektif suatu program atau pelayanan (Mahmudi, 2005). Sutrisno (2010) menyatakan terdapat lima kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan dan perubahan nyata. Terkait dengan 5 kriteria tersebut dalam pelaksanaan supervisi dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Pemahaman program

PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Penerima manfaat berhak mendapatkan bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas pendidikan, kesehatan serta program komplementaritas.

Pendamping PKH merupakan sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Supervisor ditugaskan untuk melakukan monitoring tugas pendamping.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai seorang supervisor selalu berusaha untuk mendukung pendamping dan juga tetap membantu pendamping dalam persiapan menyampaikan materi seperti melakukan *coaching* sebelum pendamping mengadakan pertemuan FDS.

Supervisor melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pertemuan FDS baik dari segi materi, fasilitator, laporan serta evaluasinya; membahas kasus kasus yang terjadi dalam kelompok dan alternatif penyelesaiannya dengan pendamping PKH; mendiskusikan kesulitan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pemberdayaan; mengurangi beban psikologis pendamping pada saat FDS serta menjalin relasi yang baik dengan semua pendamping. Dengan demikian, Supervisor PKH sangat memahami tugasnya untuk mendukung kinerja pendamping dengan melakukan monitoring agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial.

2. Ketepatan sasaran

Sasaran penerima program PKH adalah masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Penerima bantuan merasa sangat terbantu karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat meningkatkan pendidikan anak-anak, memperoleh pelayanan kesehatan dan dapat mengikuti pelatihan melalui FDS sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya. KPM terbantu dengan kehadiran pendamping yang membantu proses pencairan dana dan pelatihan yang dilakukan.

Keluarga penerima manfaat dapat berkonsultasi, menyampaikan pengaduan masalah dengan mudah baik melalui pendamping sosial maupun secara langsung kepada supervisor. Tentu saja dari konseling tersebut keluarga penerima manfaat tidak perlu khawatir mengenai kerahasiannya, karena supervisor berpedoman pada kode etiknya sebagai pekerja sosial.

Pendamping PKH dengan latar belakang ilmu sosial yang berbeda-beda sering memiliki kesulitan dalam melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat. Supervisor membantu kesulitan yang dihadapi pendamping ketika menjadi fasilitator FDS ataupun ketika mengalami masalah dalam penyaluran bantuan.

Saat ini jumlah penerima manfaat 31.282 keluarga, jumlah pendamping PKH di Kota Depok ada 99 orang, setiap pendamping bertanggung jawab untuk membina 300 keluarga penerima manfaat. Sementara jumlah supervisor tidak sebanding dengan jumlah pendamping hal ini berakibat tidak semua pelaksanaan FDS dapat dihadiri oleh supervisor, akan tetapi monitoring tetap dilakukan dengan melihat laporan dan dokumen pelaksanaan FDS.

3. Ketepatan waktu

Supervisor mendorong kedisiplinan pendamping untuk melaksanakan tugas dan membuat laporan sesuai waktu yang ditentukan. Apabila pendamping lalai atau tidak tepat waktu dalam bertugas maka akan diberikan sanksi berupa teguran atau surat peringatan.

Pertemuan FDS dirancang 1 bulan sekali, setelah kegiatan dilakukan pendamping mengirimkan bukti kegiatan berupa daftar hadir, materi yang disampaikan, dokumentasi kegiatan kepada supervisor. Monitoring dan evaluasi laporan terus dilakukan. Jika ditemukan masalah dalam pelaksanaan program maka akan diadakan pertemuan untuk identifikasi masalah dan cara penyelesaiannya.

4. Pencapaian tujuan

Tujuan pendampingan PKH adalah memberikan pengarahan, mendampingi proses pembayaran, pemberdayaan, manajemen kasus, berkunjung ke rumah penerima manfaat, memfasilitasi proses pengaduan, mengunjungi penyedia layanan. Pemberdayaan ini dilakukan agar penerima manfaat dapat meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tugas supervisor melakukan monitoring terhadap kinerja pendamping, apabila ada yang tidak terlaksana dengan tepat supervisor akan mengevaluasi dan mencari solusi. Supervisor PKH melakukan monitoring agar pendamping melakukan tugas dan tanggungjawab dalam FDS, menciptakan suasana kerja yang baik dengan mengurangi beban psikologis pendamping melalui keterampilan menjalin relasi dan komunikasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping sehingga dapat

5. Perubahan nyata

Perubahan nyata adalah sejauh mana program layanan dapat memberikan hasil nyata kepada kelompok sasaran. Pada Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Depok menargetkan 10 persen dari total KPM peserta graduasi atau keluar dari zona kemiskinan setiap tahunnya. Saat ini, jumlah KPM peserta PKH di Kota Depok sebanyak 31.282 keluarga. Sampai kuartal dua tahun 2021, sebanyak 3.324 KPM-PKH dinyatakan telah mencapai graduasi di Depok. Graduasi adalah penghentian bantuan sosial. Penghentian bantuan secara mandiri apabila penerima secara sukarela mengundurkan diri menjadi penerima karena sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau taraf perekonomiannya sudah meningkat. Sementara, penghentian secara alamiah karena berakhirnya kepesertaan atau sudah tidak memenuhi lagi kriteria kepesertaan.

SIMPULAN

Kegiatan supervisi oleh supervisor UPPKH Kota Depok telah dilaksanakan dengan menjalankan fungsi monitoring. Tugas pendamping menjalankan fungsi administrasi, fungsi edukatif, dan fungsi dukungan.

Fungsi administrasi, yaitu fungsi yang berhubungan mengenai administrasi. Fungsi ini dilakukan dengan membuat dan memeriksa laporan rutin tentang absensi, jadwal pelaksanaannya mulai dari jadwal hari, tanggal, lokasi FDS, berapa kelompok, materinya. Dari administrasi yang ada, kemudian seorang supervisor akan mencari jalan keluar hal-hal apa saja yang sekiranya perlu mendapatkan perbaikan atau jalan keluar misalnya pada laporan tersebut terdapat kendala yang dialami.

Fungsi edukatif, dilakukan dengan memberikan *coaching*. Walaupun pendamping sudah mendapatkan materi melalui daring, pelatihan atau diklat dari pusat namun sebagai supervisor tetap melakukan pemantapan sebelum pendamping turun ke lapangan untuk melaksanakan FDS.

Fungsi dukungan, pendamping dalam melaksanakan FDS perlu dukungan supervisor dengan menciptakan situasi yang cair, akrab, selalu menjalin komunikasi agar pendamping tidak sungkan menceritakan segala keluhan dalam melaksanakan tugasnya, lalu supervisor juga memberikan alat pendukung untuk memudahkan pendamping dalam penyampaian materi. Alat pendukung tersebut berupa CD, brosur, modul, dan sebagainya.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut. Tugas Supervisi dilakukan sangat membantu para pendamping dalam menjalankan kegiatan *Family Development Session* ini, karena latar belakang pendamping dari berbagai bidang ilmu sosial sehingga hadirnya supervisor ini bisa lebih memaksimalkan kegiatan tersebut. Untuk hal tersebut, jumlah supervisor perlu ditingkatkan mengingat saat ini jumlah supervisor belum sebanding dengan jumlah pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi R. (2013). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press
- Azwar, Azrul (2010). *Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga*. Tangerang: Binarupa Aksara
- Dunn, William. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada university Press
- Hilmiah & Respati, Dyah (2022). *Profil Kemiskinan Kota Depok 2021*. Kota Depok: Badan Pusat Statistik
- Gunawan, I. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ife, Jim (2006). *Community Development*. 3rd edition. Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd.
- Mahmudi, (2005) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Kadushin, A., & Harkness, D (2002). *Supervision in Social Work*. New York & Chichester : Columbia University Press
- Kementrian Sosial. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan*. Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sidik Sandi dkk. (2017) Dilema Supervisi Dalam Praktik Supervisi Pekerjaan Sosial, jurnal penelitian dan PPM, Vol4, No 2, ISSN:2442-448x Hal 331-338
- Suharto, Edi. (2013). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Susantyo, Badrun dkk. (2018). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendampingan Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
- Sutrisno, Edy. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Yana safitri, Santoso Tri rahardjo, Rudi Saparudin Darwis (2017). Meningkatkan Kapabilitas Pekerja Sosial melalui Supervisi Pekerjaan Sosial. Jurnal penelitian dan PPM, Vol4, No 2, ISSN:2442-448x(p), 2581-1126 Hal 129-389